

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya *good goverment* dalam penyelenggaraan Negara, maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani dan melakukan tugas-tugasnya dalam mengelola daerahnya. Setiap Pemerintah Daerah pasti ingin memiliki laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai alat pengambil keputusan, begitupun Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas suatu entitas.

Ketentuan yang mengatur penyusunan laporan keuangan secara teknis diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan di mana dijelaskan bahwa untuk menyusun laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang baik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Setiap Pemerintah Daerah akan menyusun laporan keuangan setiap tahunnya. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari akuntabilitas, transparansi, serta opini yang didapat setelah laporan keuangan tersebut selesai diaudit. Namun baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih banyak yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) bahkan *Disclaimer*. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2015 sedangkan pada tahun-

tahun sebelumnya Kabupaten Gresik masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Sekarang ini banyak kabupaten khususnya di Provinsi Jawa Timur yang belum bisa mempertahankan bahkan belum bisa mencapai opini WTP. Salah satu alasannya adalah akibat dari pengelolaan aset yang masih belum memadai. Berdasarkan informasi (Prajitno, 2014) aset tetap masih merupakan akun yang dikecualikan atau dianggap tidak wajar dalam opini laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda). Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa Kualitas laporan keuangan SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mencapai kategori baik. Mayoritas (66,67%) laporan keuangan SKPD berada pada kategori cukup dan kurang, khususnya laporan tentang ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan penjelasan secara rinci aset tetap (Pradono dan Basukianto, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh (Simamora dan Halim, 2012) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh Sumber daya manusia, Bukti kepemilikan, Penilaian Aset, Komitmen Pemimpin, Sikap tanggung jawab dan kepedulian dan penelitian lain yang dilakukan (Kolinug, DKK, 2015) mengemukakan bahwa dari 15 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai. Dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan memperlihatkan bahwa dalam mengelola aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah tidak semudah yang kita dibayangkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan.” Di mana penelitian tersebut dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini yaitu : Bagaimana Pengelolaan Aset Tetap Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan aset tetap daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat

1. Bagi Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sumbangan solusi dan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam memperbaiki pengelolaan aset sehingga kualitas laporan keuangan bisa lebih baik lagi.

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan aset tetap yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang *real* terjadi di lapangan sehingga peneliti bisa membandingkan langsung teori-teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan pelaksanaannya di lapangan.

3. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan pengetahuan dibidang akuntansi khususnya dibagian pengelolaan aset Daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu magang

Lokasi yang dipilih peneliti untuk tempat magang yaitu di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik dengan waktu 30 hari kerja pada tanggal 16 Januari 2017 – 24 Februari 2017.